

**PENGARUH KARAKTERISTIK *CORPORATE*  
*GOVERNANCE* TERHADAP *EFFECTIVE TAX*  
*RATE (ETR)***

STUDI EMPIRIS PADA BUMN YANG TERDAFTAR DI BEI SELAMA  
PERIODE TAHUN 2009 - 2011



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**Hashemi Rodhian Hanum**

**NIM. C2C009180**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
JURUSAN AKUNTANSI  
SEMARANG  
2013**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Hashemi Rodhian Hanum

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009180

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi

Judul Usulan Penelitian : **PENGARUH KARAKTERISTIK *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *EFFECTIVE TAX RATE (ETR)* (STUDI EMPIRIS PADA BUMN YANG TELAH *GO PUBLIC* SELAMA 2009 – 2011)**

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt.

Semarang, 27 Februari 2013

Dosen Pembimbing,

(Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt.)  
NIP. 19580525 199103 2001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Penyusun : Hashemi Rodhian Hanum  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009180  
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi  
Judul Usulan Penelitian : **PENGARUH KARAKTERISTIK *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *EFFECTIVE TAX RATE* (ETR) (STUDI EMPIRIS PADA BUMN YANG TELAH *GO PUBLIC* SELAMA 2009 – 2011)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 8 Maret 2013**

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. (.....)
2. Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt. (.....)
3. Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt. (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Hashemi Rodhian Hanum, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate (ETR)* (Studi Empiris pada BUMN yang telah *go public* Selama Tahun 2009 – 2011)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagaian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 27 Februari 2013  
Yang membuat pernyataan

(Hashemi Rodhian Hanum)  
NIM. C2C009180

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the influence of Corporate Governance Characteristics consisting of: Independent Commissioner, Audit Committee and the Institutional Shareholders on the Effective Tax Rate. This study is an empirical research with the purpose of sampling techniques in data collection. Secondary data obtained from financial statements that have been privatized government enterprises and listing on the Stock Exchange during the year 2009 to the year 2011. Multiple regression analysis was conducted using SPSS version 16.00 for windows.*

*The test results showed that of the three hypotheses proposed hypothesis none accepted hypothesis. Hypothesis 1 (the proportion of independent commissioners positive effect on effective tax rate), hypothesis 2 (the size of the audit committee is a positive influence on effective tax rate) and hypothesis 3 (institutional investors a positive effect on effective tax rate).*

*Keywords: Effective Tax Rate, Corporate Governance, Shareholder Activities, Government Companies.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* yang terdiri dari: Komisaris Independen, Komite Audit dan Pemegang Saham Institusional terhadap *Effective Tax Rate*. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik *purpose sampling* dalam pengumpulan data. Data diperoleh dari data sekunder laporan keuangan perusahaan pemerintah yang telah diprivatisasi dan *listing* di BEI selama tahun 2009 hingga tahun 2011. Analisis dilakukan dengan regresi berganda menggunakan program SPSS version 16.00 untuk windows.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dari tiga hipotesis yang diajukan tidak ada satu pun hipotesis yang diterima. Hipotesis 1 (proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*), hipotesis 2 (ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*) dan hipotesis 3 (*investor* institusional berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*).

Kata Kunci: *Effective Tax Rate*, *Corporate Governance*, Aktivitas Pemegang Saham, Perusahaan Pemerintah.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbilalamin, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga akhirnya penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) (Studi Empiris pada BUMN yang telah *go public* Selama Periode Tahun 2009-2011)** ini dapat terselesaikan dengan lancar dan tepat waktu. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Program Strata (S1) untuk meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan sebuah itikad dan semangat untuk memberikan sumbangsih terhadap pengembangan kajian ilmu pengetahuan, khususnya Akuntansi. Penulis menyadari bahwa karya ini hanya sebagian kecil dari ribuan karya yang lain, namun penulis berharap agar karya ini tetap memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, arahan dan doa dari berbagai pihak yang turut terlibat didalamnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus memberikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dan merupakan sumber kekuatan terbesar penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bimbingan, koreksi, arahan yang sangat berharga bagi penulis.
5. Ibu Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt selaku dosen wali yang telah menjadi orang tua penulis selama di kampus.
6. Semua pendidik, dosen dan segenap civitas akademika Universitas Diponegoro yang telah memberikan tambahan ilmu dan wawasan bagi penulis.
7. Orang tuaku tercinta, Mama Mirzanah Papa Hasbi yang tak henti-hentinya bersabar, mengarahkan, mendukung, mendoakan, dan selalu memberikan perhatian serta kasih sayang selama ini.
8. Kakakku tersayang Mbak Rina, Mas Ari atas segala bantuannya baik moril maupun materil, semangat, doa serta dukungannya.

9. Seluruh keluarga besar Yogyakarta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doanya.
10. Virda Rakhma Septiputri, yang selalu meluangkan waktunya untuk menemaniku, membantuku, menyemangatiku, juga untuk kasih sayang, doa dan perhatiannya sampai skripsi ini selesai.
11. Teman seperjuangan dalam bimbingan mbak Dwi Arini Untoro yang selalu berbagi ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini serta memberikan semangat hingga akhirnya skripsi ini selesai.
12. Kawan-kawan seperjuangan Bima, Rino, Geygy, Arif, Dimas, Galih, David, Temy, Yudha, Mbah Adit, Dedy, Annas, Wibi, Glory, Kono, Astri, Didot, Santy, Okta, Richa, dll. Terima kasih atas kebersamaan selama ini, tetap semangat dan terus berjuang agar dapat terbang tinggi mengapai cita-cita dan tujuan hidup masing-masing.
13. Teman-teman Akuntansi 2009 yang telah memberikan warna baru dalam kehidupan penulis serta dengan tulus memberikan bantuan dan kebersamaan selama ini.
14. Teman-teman KKN Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, yang telah berbagi keceriaan dan semangat walaupun sebentar namun telah memberikan warna yang berbeda dalam kehidupan penulis.
15. Bapak dan Ibu Kontrakan Akuntansi 09 yang telah menjaga dan memerikan perhatian selama ini.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Februari 2013

Hashemi Rodhian Hanum

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar dengan Qalam, Dialah yang mengajar manusia segala yang belum diketahui” (Q.S Al-Alaq 1-5).*

*“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Q.S Ar Ra’d : 11)*

*“Jadilah manusia yang pada kelahirannya semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu yang menangis dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum” – Mahatma Gandhi -*

Buah karya ini kupersembahkan untuk:

Orang tuaku tercinta  
Keluargaku tersayang

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTACT .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1.4 Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Teori Keagenan .....	13
2.2 <i>Effective Tax Rate</i> (ETR) .....	15

2.3 Konsep <i>Corporate Governance</i> .....	18
2.3.1 Pengertian <i>Corporate Governance</i> .....	18
2.3.2 Prinsip-prinsip <i>Corporate Governance</i> .....	21
2.3.3 Manfaat dan Tujuan <i>Corporate Governance</i> .....	22
2.3.4 Karakteristik <i>Corporate Governance</i> .....	23
2.3.4.1 Komisaris Independen .....	24
2.3.4.2 Komite Audit .....	27
2.3.4.3 <i>Investor</i> Institusional .....	28
2.4 Penelitian Terdahulu .....	29
2.5 Pengembangan Hipotesis .....	33
2.6 Variabel-variabel Kontrol Penelitian .....	38
2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	41
3.1.1 Variabel Dependen .....	41
3.1.2 Variabel Independen .....	42
3.1.3 Variabel Kontrol .....	43
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian .....	45
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	46
3.4 Metode Analisis .....	47
3.4.1 Uji Statistik Deskriptif .....	47
3.4.2 Uji Asumsi Klasik .....	47

3.4.3 Analisis Regresi Berganda .....	51
3.4.4 Pengujian Hipotesis .....	52
3.4.4.1 Uji Statistik Simultan (Uji F) .....	52
3.4.4.2 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	53
3.4.4.3 Uji Parsial (Uji t) .....	53
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS .....</b>	<b>55</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	55
4.2 Statistik Deskriptif .....	56
4.3 Uji Asumsi Klasik .....	60
4.3.1 Uji Normalitas .....	60
4.3.2 Uji Multikolonieritas .....	62
4.3.3 Uji Autokorelasi .....	63
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas .....	64
4.4 Analisis Data .....	66
4.4.1 Uji Regresi Berganda .....	66
4.4.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	68
4.4.3 Uji Hipotesis .....	69
4.4.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	69
4.4.3.2 Uji Parsial (Uji t) .....	70
4.5 Pembahasan Hasil Pengujian Statistik .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
5.1 Simpulan .....	80

5.2 Keterbatasan Penelitian .....	81
5.3 Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel 4.1 Hasil Seleksi Sampel Kriteria .....	55
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif .....	56
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Normalitas ( <i>One-Sample Kolgorov-Smirnov</i> ) ....	61
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Multikolinearitas .....	63
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Autokorelasi ( <i>Durbin Watson</i> ) .....	63
Tabel 4.10 Hasil Pengujian <i>Glejser</i> .....	65
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Regresi .....	66
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Determinasi ( $R^2$ ) .....	69
Tabel 4.13 Hasil Pengujian Simultan (Uji F) .....	69
Tabel 4.14 Hasil Pengujian Parsial (Uji t) .....	70

## DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

	Halaman
Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran .....	40
Grafik 4.4 <i>Normal Probability Plot Effective Tax Rate</i> .....	61
Grafik 4.5 <i>Histogram Normalitas Effective Tax Rate</i> .....	62
Grafik 4.8 <i>Scatterplot Effective Tax Rate</i> .....	65

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sampel Perusahaan .....	88
Lampiran 2 Tabel Input Data Penelitian .....	89
Lampiran 3 Hasil Olah Data Dengan SPSS 16 .....	91

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke mempunyai jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa merupakan jumlah yang sangat besar dan merupakan suatu objek potensial dalam pajak. Tingginya jumlah pertumbuhan perusahaan di Indonesia seperti perusahaan manufaktur maupun jasa menyebabkan roda perekonomian bergerak dengan cepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut.

Pertumbuhan industri yang cukup signifikan menyebabkan Pemerintah Indonesia pada tahun 2008 melakukan revisi terhadap undang-undang di bidang perpajakan dengan mengeluarkan beberapa undang-undang pajak baru yang mulai efektif berlaku pada 1 Januari 2009. Revisi tersebut meliputi Undang-undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPH), serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM) (Nasution, 2009). Revisi undang-undang perpajakan menunjukkan adanya reformasi terhadap perpajakan di Indonesia.

Anggito Abimanyu (2003) menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama,

yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan pada administrasi perpajakan yang tinggi dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Reformasi perpajakan dilakukan Pemerintah Indonesia agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi. Selain itu, pertimbangan pemerintah lainnya adalah dalam rangka menghadapi krisis keuangan global yang mendesak untuk memperkuat perekonomian nasional yang berasal dari sektor perpajakan yang lebih stabil. Untuk mencapai misi pemerintah tersebut, maka melalui UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan tahun 2008 pemerintah memberikan insentif dan kemudahan kepada para pengusaha sehingga dapat mendorong para pengusaha untuk melakukan aktifitasnya lebih giat lagi.

Insentif yang diberikan pemerintah berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan menjadi 28% pada tahun 2009 dan akan menjadi 25% pada tahun fiskal 2010. Para pelaku usaha akan mendapatkan tambahan potongan 5% jika Wajib Pajak Badan tersebut merupakan Wajib Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dengan minimal 40% kepemilikannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan saham tersebut dimiliki minimal 300 (tiga ratus) pihak.

Penurunan tarif yang terjadi setelah adanya reformasi perpajakan tersebut diharapkan dapat menguntungkan wajib pajak badan sehingga penerimaan dari wajib pajak badan lebih meningkat. Undang-undang yang memberatkan dunia usaha akan berdampak banyaknya dunia usaha akan kehilangan sejumlah besar laba dan konsekuensinya akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Hal tersebut

menjelaskan bahwa pajak dapat mempengaruhi *capital budgeting* melalui *tax effect* dalam penentuan aliran kas, pajak juga merupakan salah satu faktor utama dalam perencanaan sistem kompensasi manajemen (Blocher, Chen, dan Lin 1999).

Pajak dalam perusahaan mendapatkan perhatian yang cukup signifikan, dikarenakan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan sehingga sebisa mungkin perusahaan membayar pajak serendah mungkin. Berbeda dengan pemerintah yang menganggap pajak adalah penerimaan negara yang cukup penting sehingga pemerintah akan menarik pajak setinggi-tingginya. Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan manajemen perusahaan mengenai pajak menyebabkan banyak perusahaan ketika mendapatkan beban pajak yang dirasakan terlalu berat maka mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanipulasi laba perusahaan (Wulandari, dkk, 2004).

Upaya mengurangi beban pajak yang dihasilkan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Berbagai kebijakan dapat diambil oleh perusahaan guna menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan termasuk dalam pemilihan metode akuntansi sehingga dapat menurunkan besaran pajak efektif. Pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate/ETR*). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Karayan dan Swenson (2007), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya

adalah dengan melihat tarif efektifnya. Keberadaan nilai *effective tax rate* (ETR) merupakan salah satu bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan, oleh karena itu keberadaan dari *effective tax rate* (ETR) kemudian menjadi suatu perhatian yang khusus pada berbagai penelitian karena dapat merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan (Liansheng *et al.*, 2007).

Pemberian insentif berupa penurunan tarif tersebut akan menyebabkan terjadinya penurunan jumlah pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan namun dengan penurunan tarif tersebut apakah telah tercipta suatu tarif yang adil dan tidak ada yang dirugikan antara pihak fiskus maupun pihak pembayar pajak. Banyak hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR). Dengan adanya perbedaan karakteristik tersebut menimbulkan suatu keraguan mengenai apakah aturan atau kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah telah memberikan ruang bermain bagi seluruh perusahaan yang ada (Gupta dan Newberry, 1997). Hal ini dapat dikaji lebih lanjut karena pada dasarnya setiap perusahaan mengharapkan keuntungan yang maksimal.

Adanya reformasi keuangan negara yang tertera pada UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1/2004 Pasal 68 dan 69 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan adanya pergeseran basis penganggaran dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja yang menyebabkan adanya pergeseran arah dalam penggunaan dana oleh pemerintah. Pergeseran tersebut

mengakibatkan penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi *input*, tetapi pada *output*. Oleh karena itu kinerja perusahaan pemerintah dituntut untuk lebih efektif agar output yang dihasilkan dapat sesuai harapan, dan dengan adanya privatisasi pada perusahaan pemerintah membawa suatu tantangan baru karena sejumlah % (persen) kepemilikan berada ditangan masyarakat.

Pada perusahaan pemerintah yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia mayoritas pemegang saham berada di tangan pemerintah, oleh karena itu pemerintah dapat mengontrol kegiatan operasional perusahaan. Pemegang saham mayoritas di indikasikan terlibat dalam penetapan besaran *effective tax rate* (ETR) perusahaan dan pada perusahaan pemerintah terdapat indikasi konflik antara pihak manajemen perusahaan dan pemegang saham mayoritas dalam hal kebijakan penetapan besaran *effective tax rate* (ETR) tersebut.

Konsep *corporate governance* (CG) merupakan suatu tuntutan yang harus dihadapi ketika suatu perusahaan telah *listing* di BEI, oleh karena itu sangat penting bagi manajemen untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin dan bagaimana seharusnya entitas tersebut dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara serta menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. *Corporate governance* atau tata kelola perusahaan pada dasarnya merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan dewan komisaris, peran dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Agoes dan Ardana, 2009). Perkembangan *corporate governance* pada perusahaan akhir-akhir ini menunjukkan *trend* yang sangat baik dimana hampir seluruh perusahaan telah menerapkannya.

*Corporate governance* sendiri merupakan suatu aturan yang akan menghasilkan suatu kepercayaan antara pemilik (*principal*) dengan (*management*) dan nantinya pemilik akan percaya atas seluruh kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dalam penelitian ini karakteristik *corporate governance* yang digunakan adalah komisaris independen, komite audit dan *investor* institusional.

Salah satu struktur kepemilikan yang cukup besar dalam sebuah perusahaan adalah kepemilikan institusional dimana kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga. Investor institusional dapat dikatakan sebagai manajemen eksternal perusahaan karena mereka berasal dari luar perusahaan. Lembaga tersebut bisa berupa perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan *asset management*. Pertumbuhan yang dominan dari kepemilikan institusional di pasar modal mencerminkan konsentrasi dan kenaikan kekayaan oleh *investor* institusional (Brancato & Gaughan, 1991 dalam Fauzi, Mahoney, dan Rahman, 2007).

Komite audit dan komisaris independen dalam perusahaan akan menjadi sangat penting jika perusahaan tersebut menerapkan *corporate governance*. Komite audit dan komisaris independen bertugas untuk menjaga manajemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan.

*Corporate governance* dalam suatu perusahaan bertujuan agar terciptanya suatu tata kelola perusahaan yang baik, efektif dan efisien dimana dalam mekanisme *corporate governance* telah diatur penerapan-penerapan yang harus dilakukan oleh

perusahaan agar perusahaan dapat terus berkembang namun tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena *corporate governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan *stakeholder*. Kinerja perusahaan yang baik dapat diukur dengan laba yang diperoleh perusahaan, laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (*sustainable earnings*) di masa depan.

Pencapaian laba perusahaan tidak luput dari pemilihan keputusan yang tepat dalam melakukan kegiatan perusahaan. Keputusan yang diambil perusahaan harus efektif, efisien dan tepat termasuk dalam penentuan kebijakan yang terkait tarif pajak efektif. Besaran tarif pajak efektif perusahaan bergantung pada beberapa aspek perusahaan seperti dalam pemilihan metode akuntansi maupun adanya pengaruh langsung dari pemegang saham perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *corporate governance* yang baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang efektif dan akan berdampak pada keputusan untuk yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan.

Studi mengenai *corporate governance* dan *effective tax rate* (ETR) telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu namun hanya menganalisis kinerja perusahaan saja, antara lain: Wulandari (2006) menemukan hubungan yang tidak signifikan antara *corporate governance* dan kinerja perusahaan, sedangkan Hajiha & Ghasempoor (2012) menemukan hubungan yang signifikan antara *corporate governance* dan *economic value added*. Selain itu juga banyak penelitian yang

menganalisis *corporate effective tax rate (CETR)*, antara lain: Sabli dan Noor (2012) menemukan hubungan yang tidak signifikan antara *corporate governance* dan *corporate effective tax rate (CETR)*, sedangkan Noor, Syazwani, dan Azam (2010) menemukan adanya hubungan yang positif antara *corporate effective tax rate (CETR)* dengan karakter perusahaan dan sistem pajak. Minnick dan Noga (2010) menemukan bahwa *tax management* mempunyai hubungan yang signifikan terhadap peningkatan kinerja perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Sabli dan Noor (2012). Pada penelitian ini akan menguji karakteristik *corporate governance* (kepemilikan institusional, komite audit dan komisaris independen) berpengaruh terhadap *effective tax rate (ETR)* dengan menyertakan ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, *profitabilitas*, dan CIR sebagai variabel kontrol. Dimana variabel komite audit merupakan variabel tambahan yang diteliti pada penelitian ini. Variabel kontrol digunakan untuk meminimalisir pengaruh dari faktor-faktor di luar variabel yang diuji (Sekaran, 2003).

Berdasarkan uraian di atas maka perlu untuk mengadakan penelitian mengenai karakteristik *corporate governance* terhadap *effective tax rate (ETR)* dalam perusahaan pemerintah. Sebab dalam perusahaan pemerintah yang telah *listing* di BEI terdapat indikasi konflik antara pemegang saham utama dengan manajemen perusahaan dalam hal penentuan kebijakan yang terkait besaran *effective tax rate (ETR)*. Oleh karena itu bidang ini masih merupakan masalah yang menarik untuk diteliti. Atas dasar tersebut tersebut, penelitian ini diberi judul “**Pengaruh**

**Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate*” (Studi Empiris pada Perusahaan Pemerintah yang Terdaftar di BEI Selama Periode Tahun 2009-2011).**

**I.2 Rumusan Masalah**

*Corporate governance* merupakan salah satu elemen yang cukup penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomis dan kualitas kinerja, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan para *stakeholders* lainnya agar perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan efisiensi. Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I. A mengenai Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dan sesuai dengan pedoman mengenai *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Tata Kelola Nasional pada tahun 2006 yang menjelaskan bagaimana perusahaan melakukan tata kelola perusahaan yang baik maka penerapan *corporate governance* adalah wajib diterapkan bagi semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan akan berdampak baik dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang baik, efektif dan efisien. Ketika perusahaan berhasil dalam melaksanakan *corporate governance* secara efektif maka akan berdampak pada kinerja perusahaan sehingga dalam pelaksanaannya akan menghasilkan keputusan-keputusan yang efektif bagi para *stakeholders* termasuk

dalam menentukan besaran tarif pajak efektif. Berdasarkan penjelasan tersebut timbul pertanyaan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *effective tax rate* ?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *effective tax rate* ?
3. Apakah *investor* institusional berpengaruh terhadap *effective tax rate* ?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap *effective tax rate* (ETR) melalui:

1. Menguji pengaruh *investor* institusional terhadap *effective tax rate*
2. Menguji pengaruh komite audit terhadap *effective tax rate*
3. Menguji pengaruh komisaris independen terhadap *effective tax rate*

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak sebagai bahan masukan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih netral dan adil serta memberikan kontribusi dalam membuat mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak.
2. Bagi para praktisi untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai dampak dari penerapan *corporate governance* terhadap tingkat pajak efektif.

3. Bagi para akademisi dan peneliti untuk memberikan bukti empiris dan mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh tingkat pajak efektif perusahaan dan *corporate governance* serta sebagai informasi dan bahan masukan dalam melakukan penelitian lainnya.

### **I.5 Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini sistematika penulisan terdiri dari 5 bab yaitu :

a) Bab I

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah yaitu berdasarkan latar belakang yang ada timbul pertanyaan-pertanyaan peneliti yang nantinya menjadi sebuah hipotesis, dan tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan tujuannya dilakukan penelitian dan manfaat yang didapat dari penelitian ini.

b) Bab II

Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis dari penelitian yang dilakukan.

c) Bab III

Di bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yaitu penjelasan dari tiap-tiap variabel penelitian, populasi dan sampel dari penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

d) Bab IV

Bab IV berisi mengenai hasil dan analisis penelitian yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

e) Bab V

Pada bab V ini berisi mengenai kesimpulan peneliti atas penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian yang dilakukan, dan saran yang diberikan peneliti untuk peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Keagenan**

Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep *corporate governance*. Teori keagenan ini dikembangkan oleh Michael Johnson seorang Profesor dari Harvard yang memandang bahwa manajemen perusahaan (*agents*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Teori agen dipandang lebih luas karena teori ini dianggap lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada teori agen dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn, 1999).

Teori keagenan ini muncul ketika terjadi sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Seorang manajer (*agent*) akan lebih mengetahui mengenai keadaan perusahaannya dibandingkan dengan pemilik (*principal*). Manajer (*agent*) berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik (*principal*).

Manajer bertugas untuk mengelola perusahaan dengan sebaik mungkin sehingga perusahaan akan menghasilkan laba yang cukup signifikan. Jumlah laba yang dihasilkan tersebut akan dilaporkan oleh pemilik sehingga pemilik dapat

mengetahui seberapa efektif dan efisiennya kinerja manajer perusahaan. Adanya tanggung jawab yang lebih besar tersebut, menjadikan manajer menginginkan adanya imbalan yang lebih besar juga. Dengan demikian dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan tersebut dan kepentingan bagaimana memegang tanggung jawab yang besar sehingga mendapatkan imbalan yang besar juga, yaitu kepentingan untuk pribadinya sendiri.

Menurut Eisenhardt (1989) bahwa *agency theory* menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004) dalam Harduyanto (2011). Yaitu kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil yang telah dicapai dalam mengelola tanggung jawab dari sebuah perusahaan.

Tujuan utama dengan adanya *agency theory* tersebut adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir *cost* sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi yang mengalami ketidakpastian. *Agency theory* juga berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang disebabkan karena pihak-pihak yang menjalin kerja sama dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan

yang berbeda termasuk dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mengelola suatu perusahaan.

Teori agensi pada penelitian ini menjelaskan bahwa adanya konflik yang akan timbul antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan termasuk perusahaan-perusahaan pemerintah yang telah *listing* di BEI. Konflik tersebut terjadi ketika pemilik utama perusahaan tersebut adalah *fiskus* (pemerintah) sekaligus pembuat regulasi dalam hal perpajakan sementara disisi lain terdapat pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak. Pihak fiskus yang merangkap sebagai pembuat regulasi berharap akan adanya pemasukan yang sebesar-besarnya dari sektor pajak sementara pada pihak manajemen terdapat pandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan menghasilkan beban pajak yang rendah. Terdapat dua sudut pandang yang berbeda tersebut dapat menyebabkan adanya konflik antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen perusahaan.

## ***2.2 Effective Tax Rate***

*Effective tax rate* (ETR) pada dasarnya adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. *Effective tax rate* (ETR) dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga *effective tax rate* (ETR) merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan (Aunalal, 2011). Sedangkan menurut Richardson dan Lanis (2007) tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. Xing dan Shunjun (2007) dalam Wibowo

(2012), mendefinisikan *effective tax rate* (ETR) sebagai rasio (dalam presentase) dari pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan total pendapatan sebelum pajak penghasilan akuntansi sehingga dapat mengetahui seberapa besar presentase perubahan membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan.

Kevin dan Thomas (1985) dalam Aunalal (2011) memberikan beberapa alasan mendasar terkait dengan penetapan *effective tax rate* (ETR) perusahaan. Alasan pertama adalah adanya pengaruh politik yang terjadi dalam proses perpajakan. Pengaruh perubahan politik terkadang dapat menyebabkan adanya intervensi tergantung dengan bagaimana pihak-pihak yang berkuasa dan yang berkepentingan. Tidak transparasinya proses penetapan tarif pajak yang dilakukan pemerintah menyebabkan adanya kemungkinan intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Alasan kedua adalah kandungan informasi laporan pajak perusahaan yang ditimbulkan oleh para *investor*. Dengan laporan pajak maka para *investor* dapat melihat sejauh mana perusahaan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan *investor* yang cenderung memilih berada pada jalur aman dalam setiap investasinya.

Fulleron (1984) dalam Aunalal (2011) mengklasifikasikan *effective tax rate* (ETR) dalam empat jenis yaitu:

- a. *Average Effective Corporate Tax Rate*: biaya pajak tahun berjalan dibagi dengan penghasilan perusahaan yang sebenarnya (laba sebelum pajak).

- b. *Average Affective Total Tax Rate*: besaran biaya pajak perusahaan ditambah pajak properti ditambah bunga atas pajak pribadi dan deviden, dibagi dengan pendapatan total modal.
- c. *Marginal Effective Corporate Tax Wedge*: besaran tarif penghasilan riil sebelum pajak yang diharapkan atas penghasilan dari investasi marginal, dikurangi penghasilan riil perusahaan sebelum pajak
- Marginal Effective Corporate Tax Rate*: pajak marginal efektif perusahaan dibagi penghasilan sebelum pajak (*tax-inclusive rate*) atau dengan penghasilan setelah pajak (*tax exclusive rate*).
- d. *Marginal Effective Total Tax Wedge*: penghasilan sebelum pajak yang diharapkan dalam marginal investasi dikurangi penghasilan setelah pajak sebagai penghematan atas penghasilan.
- Marginal Effective Total Tax Rate*: total pajak marginal efektif dibagi penghasilan sebelum pajak (*tax-inclusive rate*) atau dengan penghematan pajak penghasilan (*tax-exclusive rate*) yang dilakukan perusahaan.

Pada dasarnya *marginal effective rate* lebih spesifik digunakan untuk menyelidiki dampak yang terjadi atas kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan, sedangkan *average effective rate* menunjukkan beban pajak secara keseluruhan pada perusahaan. Keberadaan *effective tax rate* menurut Kern dan Morris (1992) dan Gupta dan Newberry (1997) dalam Grant dan Roman (2007) menjelaskan bahwa *effective tax rate* (ETR) sering digunakan untuk pengambilan keputusan dan

digunakan oleh pihak berkepentingan dalam mengkaji sistem perpajakan perusahaan dikarenakan adanya pengaruh kumulatif dari berbagai macam keberadaan insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan.

### **2.3 Konsep *Corporate Governance***

#### **2.3.1 Pengertian *Corporate Governance***

Sebagai sebuah konsep, *corporate governance* ternyata tidak memiliki suatu definisi tunggal. Banyak yang menafsirkan definisi *corporate governance* kedalam pemahaman masing-masing namun masih dalam batasan yang cukup wajar. *Corporate governance* menurut *Indonesian Institut for Corporate Governance* adalah suatu struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah terhadap perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

*Corporate governance* dapat berarti sebagai tata kelola yang baik dimana terdapat suatu sistem yang mengatur hubungan dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Agoes dan Ardana, 2009). Tata kelola perusahaan yang baik dapat disebut juga sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, cara pencapaiannya dan penilaian kinerja perusahaan tersebut.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang dikutip dari Surya dan Yustiavandana (2006) *Corporate Governance* didefinisikan sebagai berikut:

*“Corporate Governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specific the distribution of the right an responsibilities among different participants in the corporation such as board, manager, shareholders, and other stakeholders, and spells put the rules andf procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provide the structure through wich the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.”*

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *corporate governance* merupakan serangkaian hubungan antara perusahaan dan para *stakeholder*-nya (pemegang saham dan pihak lain yang terlibat dalam suatu perusahaan). Di dalam *corporate governance* terdapat suatu struktur perangkat yang mencapai tujuan atas pengawasan kinerja.

Komite Cadbury pada tahun 1992 melalui *Cadbury Report* mengeluarkan suatu definisi dari *corporate governance*. Definisi tersebut adalah suatu prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapainya keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *stakeholder* khususnya.

Penerapan *corporate governance* sudah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penerapan praktik *corporate governance* dalam Badan Usaha Milik Negara diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 pasal 1 tentang penerapan praktik *corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa *corporate governance* adalah:

“Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya serta berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.”

Organ yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, dan direksi, sedangkan *stakeholder* adalah pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung. *Corporate governance* didefinisikan sebagai struktur karena *corporate governance* berperan dalam mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya. Sementara sebagai sebuah proses, *corporate governance* memastikan transparansi serta proses perusahaan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan :

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara peran Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan para *Stakeholder* lainnya.
2. Suatu sistem pengecekan, perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang : pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.

### 2.3.2 Prinsip – prinsip *Corporate Governance*

*Corporate governance* adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengelola perusahaan secara baik dan benar sebagaimana mestinya dengan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selain itu *corporate governance* bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan baik dan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Solihin, 2009 dalam Waryanto, 2010). Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip utama dari *Corporate Governance*.

*Organization for Economic Cooperation and Development* dalam (Surya dan Yustiavandana, 2006) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip *Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

1. *Fairness* (Kewajaran)

Perusahaan harus memberikan kedudukan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, sehingga kerugian akibat perlakuan diskriminatif dapat dicegah sedini mungkin. Dalam hal ini, terutama kepada pemegang saham minoritas.

2. *Disclosure/Transparency* (Keterbukaan/Transparansi)

Pengungkapan informasi mengenai perusahaan harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, perusahaan harus menunjukkan adanya transparansi informasi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan para *stakeholder*.

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan para *stakeholders*.

#### 4. *Responsibility* (Responsibilitas)

Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap masyarakat maupun lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang sehingga perusahaan dapat memperoleh nama baik.

#### 5. *Independency* (Independensi)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak lain.

### **2.3.3 Manfaat dan Tujuan *Corporate Governance***

Penerapan *corporate governance* memberikan empat manfaat (*Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2006*), yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan *investor* untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders's values* dan dividen.

Tujuan dan manfaat penerapan *good corporate governance* pada perusahaan menurut Surya dan Yustiavanda (2007) adalah:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum

#### **2.3.4 Karakteristik *Corporate Governance***

Karakteristik *corporate governance* terbagi dalam dua bagian yaitu *internal governance* dan *external governance* seperti yang dijelaskan Jensen dan Meckling (1976) dalam Andayani (2010). *Internal governance* meliputi struktur dewan direksi, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif. Sedangkan *external governance* terdiri dari *institutional ownership*, pasar dan tingkat pendanaan dengan hutang (*debt financing*) (Bambang dan Rosestein, 1998) dalam Andayani (2010).

Karakteristik *corporate governance* berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat wajib memiliki:

1. Komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh komisaris.
2. Komite audit dimana anggotanya minimal berjumlah 3 (tiga) orang dan diketuai oleh seorang komisaris independen.
3. Sekretaris perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini karakteristik *corporate governance* yang digunakan adalah komisaris independen, komite audit dan *investor* institusional. Ketiga karakteristik *corporate governance* merupakan perpaduan antara *internal governance* dan *external governance*.

#### **2.3.4.1. Komisaris Independen**

Komisaris independen memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan *corporate governance* karena keberadaan dewan komisaris belum dapat memberikan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip *corporate governance*, khususnya mengenai perlindungan terhadap *investor*. Untuk mendorong implementasi *corporate governance*, dibentuk sebuah organ tambahan dalam struktur perseroan. Organ tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan *corporate governance* di dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia (Surya dan Yustiavandana, 2006). Organ-organ tambahan tersebut antara lain adalah komisaris independen dan komite audit.

Surya dan Yustiavandana (2006) menjelaskan bahwa komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan tersebut. Dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat terjadinya keseimbangan dalam perusahaan antara manajemen perusahaan dan para *stakeholder*-nya.

Keberadaan komisaris independen berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris. Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit Nomor IX.I5 adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Independen tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik;
2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Komisaris Independen harus berasal dari luar emiten atau perusahaan publik;
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Komisaris independen bersama dewan komisaris memiliki tugas-tugas utama meliputi (Surya dan Yustiavandana, 2006):

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi, dan penjualan aset. Tugas ini terkait dengan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen (*accountability*).
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan (*transparency*) dan adil (*fairness*).
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset dan manipulasi transaksi perusahaan. Tugas ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pemegang saham (*fairness*).
4. Memonitor pelaksanaan *governance*, dan melakukan perubahan jika diperlukan.
5. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan untuk menyediakan informasi yang tepat waktu dan jelas.

#### 2.3.4.2 Komite Audit

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Peraturan BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk: (i) meningkatkan kualitas laporan keuangan; (ii) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan; (iii) meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit; serta (iv) mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/dewan pengawas.

Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu dewan komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi kepada dewan komisaris), kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris, misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus. Peran dan tanggung jawab komite audit akan dituangkan dalam *Charter* Komite Audit yang secara umum dikelompokkan menjadi tiga bagian besar, yaitu *financial reporting*, *corporate governance*, dan *risk and control management*.

Komite audit dituntut untuk bertindak secara independen karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan serta

menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Surya dan Yustiavandana, 2006). Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab terhadap dewan komisaris (Hasnati, 2003) dalam Surya dan Yustiavandana, (2006).

#### **2.3.4.3 *Investor Institusional***

Husnan (2001) menegaskan bahwa ada dua jenis *ownership* dalam perusahaan di Indonesia yaitu perusahaan dengan kepemilikan sangat menyebar dan perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi. Perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen (Goldberg dan Idson, 1995) dalam Husnan (2001). Jenis kepemilikan perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi memiliki dua kelompok pemegang saham, yaitu *controlling* dan *minority shareholders* (Asian Development Bank, 2000) dalam Husnan (2001).

*Controlling shareholders* dapat bertindak sejalan dengan kepentingan pemegang saham lainnya atau bertentangan. *Controlling shareholders* mempunyai informasi yang lebih lengkap daripada *minority shareholders* sehingga dapat mempengaruhi perilaku perusahaan (*The Business Roundtable*, 1997) dalam Wulandari (2006). Pada kasus kepemilikan ini, kemungkinan muncul permasalahan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas cenderung terlibat dalam pengendalian perusahaan dan cenderung bertindak berdasarkan kehendak maupun kepentingan mereka sendiri dan terkadang mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas.

Karakteristik kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi pada institusi banyak di jumpai untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia (Husnan, 2001) dan (Gunarsih, 2003). Institusi yang dimaksud adalah pemilik perusahaan publik yang berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseroan atau pribadi. Mayoritas institusi adalah berbentuk perseroan terbatas (PT) domestik maupun perseroan terbatas multinasional. Kelemahan dalam kepemilikan yang terkonsentrasi pada institusi disampaikan oleh Shleifer dan Vishny (1997) adalah kepemilikan dalam jumlah besar dapat mendahulukan kepentingan mereka sendiri yang mungkin sekali bertentangan dengan pemilik lainnya.

Hasil pengujian empiris yang dilakukan oleh Gunarsih (2003) adalah kepemilikan institusi domestik mempengaruhi pengelolaan (*governance*) perusahaan dan semakin tinggi proporsi kepemilikan institusi domestik maka semakin rendah kinerja perusahaan. Beiner *et al.*, (2003) dan Shleider & Vishny (1997) menegaskan bahwa untuk memperbaiki *corporate governance* yaitu dengan meyakinkan bahwa perusahaan memiliki satu atau lebih pemegang saham besar. Beiner *et al.*, (2003) menjelaskan bahwa pemegang saham yang jumlahnya cukup besar (*large shareholder*) menggunakan kekuatan suara mereka untuk memperbaiki posisi mereka sendiri dari pada pemegang saham lainnya.

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Studi mengenai *corporate governance* dan *effective tax rate* (ETR) telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu namun tidak berfokus pada perusahaan pemerintah yang telah *listing* di BEI dan hanya berfokus pada kinerja perusahaan

saja, antara lain: Wulandari (2006) menemukan hubungan yang tidak signifikan antara *corporate governance* dan kinerja perusahaan, sedangkan Hajiha & Ghasempoor (2012) menemukan hubungan yang signifikan antara *corporate governance* dan *economic value added*.

Selain itu juga banyak penelitian yang menganalisis *corporate effective tax rate (CETR)*, antara lain: Sabli dan Noor (2012) menemukan hubungan yang tidak signifikan antara *corporate governance* dan *corporate effective tax rate (CETR)*, sedangkan Noor, Syazwani, dan Azam (2010) menemukan adanya hubungan yang positif antara *corporate effective tax rate (CETR)* dengan karakter perusahaan dan sistem pajak. Minnick dan Noga (2010) menemukan bahwa *tax management* mempunyai hubungan yang signifikan terhadap peningkatan kinerja perusahaan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Sabli dan Noor (2012). Penelitian Sabli dan Noor (2012) menguji *effective tax rate (ETR)* berdasarkan total beban pajak yang dihasilkan oleh perusahaan namun pada penelitian ini hanya menggunakan beban pajak kini dikarenakan pada beban pajak kini akan terlihat secara jelas berapa besaran pajak yang ditanggung perusahaan pada tahun tersebut, selain itu pada penelitian ini ditambahkan komite audit sebagai variabel karakteristik *corporate governance*. Penelitian ini juga menyertakan ukuran perusahaan, *leverage*, *profitabilitas*, dan CIR sebagai variabel kontrol sebagaimana yang telah digunakan pada penelitian terdahulu.

Penelitian ini juga dapat menguji efektifitas Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor

I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Serta penelitian ini juga dapat menguji keefektifan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 pasal 1 tentang penerapan praktik *corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Variabel	Analisis Statistik	Hasil
1	Sabli dan Noor (2012)	<i>Corporate ETR (X), Proportion of independent Directors (Y), Institutional investors (Y), and Firm size (Control), Leverage ratio, Return on Asset (ROA) (Control) and Capital intensity Ratio (Control)</i>	<i>The Multivariate Regression Models, Univariate tests</i>	Menemukan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan antara <i>corporate governance</i> dan <i>corporate effective tax rate (CETR)</i> .
2.	Hajiha dan Ghasempoor (2012)	<i>Economic Value Added (X), Institutional</i>	<i>Descriptive Statistic, Multi variable regression</i>	<i>Institutional ownership</i> berpengaruh positif dan signifikan

		<i>Ownership (Y), Large Shareholder (Y), Managerial Shareholder (Y)</i>		terhadap <i>economic value added</i> , <i>large shareholder</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>economic value added</i> , <i>managerial shareholder</i> tidak signifikan berpengaruh positif dengan <i>economic value added</i>
3.	Noor, Syazwani dan Azam (2010)	<i>Corporate ETR (X), tax system (Y) and the characteristics of companies (Y)</i>	<i>Descriptive Statistics and Univariate Analysis, Regression Results</i>	Menemukan hubungan yang positif antara <i>corporate effective tax rate (CETR)</i> dengan karakter perusahaan dan sistem pajak.
4.	Sari, Martani (2010)	<i>Tax aggressive actions (X), Corporate Governance (Y), Family Ownership (Y)</i>	<i>Descriptive analysis, ANOVA analysis, Regression panel data model</i>	Hasil penelitian menjelaskan kepemilikan keluarga cenderung lebih agresif dalam pajak dari perusahaan non-keluarga, dan praktik tata kelola perusahaan secara negatif mempengaruhi pajak agresif.
5.	Minnick & Noga (2010)	<i>Tax Management (X), Increase pay-performance (X), External governance</i>	<i>Multivariate analysis, Hansen test of exogeneity</i>	Kompensasi dalam bentuk insentif jangka panjang bagi dewan komisaris dan direksi akan memotivasi untuk melakukan <i>tax</i>

		(X)		<i>management.</i>
6.	Wulandari (2006)	Kinerja perusahaan (X), Dewan Direksi (Y), Komisaris Independen (Y), <i>Debt to equity</i> (Y), <i>Institutional Ownership</i> (Y)	Uji asumsi klasik, Regresi linear berganda	Dewan direksi tidak signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, proporsi dewan komisaris independen tidak signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, <i>deb to equity</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, <i>institutional ownership</i> tidak signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

## 2.5 Pengembangan Hipotesis

### 2.5.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate*

Komisaris Independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap internal perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti yang dijelaskan oleh Surya dan Yustiavandana,

(2006). Komisaris Independen diperlukan untuk meningkatkan independensi Dewan Komisaris dari manajemen (Michelon dan Parbonetti, 2010). Komisaris independen merupakan bagaian yang berasal dari luar manajemen sehingga komisaris independen cenderung untuk tidak terpengaruh oleh tindakan manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para *stakeholder*-nya. Bonazzi dan Islam (2007) menyatakan bahwa bukti empiris masa lalu telah menyepakati peran pengawasan yang baik dilakukan oleh dewan luar perusahaan dan direktur independen terhadap kinerja manajerial dan perusahaan secara keseluruhan dimana para dewan luar dan direktur perusahaan mengawasi perusahaan agar beroperasi sesuai dengan jalurnya dan tidak bertentangan dengan hukum.

Minnick dan Noga (2010) melihat aspek dari sisi positif yang menyangkut pada nilai perusahaan setelah pajak, yang kemudian meningkatkan kekayaan pemegang saham serta memberikan dorongan yang signifikan dari *bottom line performance*. Penelitian yang dilakukan oleh Sabli dan Noor (2012) menyimpulkan bahwa komisaris independen melakukan pengawasan yang sangat baik dengan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan.

Komisaris independen bersama dewan komisaris yang lain bersama-sama melaksanakan tugas pengawasan dan menentukan strategi kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek yang menguntungkan bagi perusahaan namun tidak melanggar hukum termasuk dalam penentuan strategi yang terkait dengan pajak. Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dilakukan agar tidak terjadi

asimetri informasi yang terjadi antara manajemen perusahaan dengan para *stakeholder*. Dengan adanya komisaris independen maka dalam setiap perumusan strategi perusahaan yang dilakukan oleh dewan komisaris beserta manajemen perusahaan dan para *stakeholder* akan memberikan jaminan hasil yang efektif dan efisien termasuk pada kebijakan mengenai besaran tarif pajak efektif perusahaan, sehingga mengarah ke hipotesis pertama sebagai berikut:

**H1 : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap nilai ETR**  
**(*Effective Tax Rate*)**

### **2.5.2 Pengaruh Komite Audit terhadap *Effective Tax Rate***

Komite audit adalah komite tambahan yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Berdasarkan keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 dalam peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa komite audit yang dimiliki oleh perusahaan minimal terdiri dari tiga orang di mana sekurang-kurangnya satu orang berasal dari anggota komisaris independen dan dua orang lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Foker, 1992) dalam Said *et al.* (2009). Pengungkapan perusahaan yang dilakukan oleh komite audit menunjukkan bahwa perusahaan telah bekerja berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah

yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Mayangsari, 2003). Komite audit berdasarkan fungsinya tersebut membantu dewan komisaris agar tidak terjadi asimetri informasi dengan melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan. Dengan semakin banyaknya pengawasan yang dilakukan terhadap suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H2 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai ETR (*Effective Tax Rate*).**

### **2.5.3 Pengaruh *Investor* Institusional terhadap *Effective Tax Rate***

Lim (2011) menjelaskan bahwa aktivitas pemegang saham melalui keterlibatan yang lebih besar dari *investor* institusi akan membantu untuk meningkatkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham (beban pajak yang lebih rendah) dimana para pemegang saham yang lebih besar dari para pemegang saham institusi akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak dan meningkatkan kekayaan dirinya sendiri. Wahab, How dan Verhoeven (2008) telah melihat peran *investor* institusional di Malaysia dimana mereka menunjukkan bahwa *investor* institusional bisa muncul bersamaan dengan tata kelola perusahaan sebagai dua agen pemantauan.

Perusahaan dalam rangka mengurangi masalah keagenan dan untuk mencapai keuntungan *bottom line performance* yang lebih tinggi dan dapat menjamin investasi

berkelanjutan maka pajak harus di turunkan melalui perencanaan pajak aktif yang didorong oleh para *investor* institusional. *Investor* institusional pada dasarnya mempunyai kendali yang cukup besar dalam berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan. Pada dasarnya setiap *investor* ingin mendapatkan laba setinggi-tingginya sehingga akan menyebabkan pembagian deviden yang cukup tinggi.

Dalam pencapaian tersebut terkadang pemegang saham institusi yang merupakan pemegang saham mayoritas mengorbankan kepentingan pemegang saham lainnya. Namun bagi manajemen, laba yang tinggi ada pengaruhnya dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. *Investor* institusional sebagai pengawas yang berasal dari eksternal akan mendorong manajemen perusahaan dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya *investor* institusional lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba. Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat indikasi *investor* institusional mempunyai andil dalam penetapan kebijakan yang terkait tingkat pajak efektif. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H3 : *Investor* Institusional berpengaruh positif terhadap nilai ETR  
(*Effective Tax Rate*)**

## **2.6 Variabel-variabel kontrol penelitian**

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dalam penelitian ini juga memasukkan beberapa variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel bebas yang dalam pelaksanaan penelitian tidak dimasukkan sebagai variabel bebas tetapi keberadaannya dikendalikan (dikontrol) dengan tujuan untuk meminimalisir pengaruh dari faktor-faktor di luar variabel yang diuji. Variabel-variabel kontrol yang digunakan antara lain:

### **2.6.1 *Size* (Ukuran perusahaan)**

Ukuran perusahaan adalah suatu skala pengklasifikasian besar kecilnya perusahaan (Setyantomo, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Zimmerman (1983) menjelaskan bahwa perusahaan yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih tinggi, sehingga dengan besaran laba yang semakin besar maka akan menunjukkan tarif efektif pajak yang semakin besar juga. Perusahaan dengan jumlah aset yang tinggi maka akan meningkatkan jumlah produktivitas juga. Ketika produktivitas meningkat maka jumlah laba yang dihasilkan perusahaan akan semakin meningkat pula dan laba adalah faktor yang mempengaruhi beban pajak yang dihasilkan.

### **2.6.2 *Leverage***

*Leverage* menjelaskan hubungan antara penggunaan dana perusahaan yang diperoleh dari hutang. Penggunaan utang dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan akan menimbulkan biaya tetap yaitu bunga. Biaya bunga dapat dikurangkan dari pajak, sehingga penggunaan utang sebagai pembiayaan operasional perusahaan akan secara langsung mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan.

Perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki nilai *effective tax rate* (ETR) yang lebih rendah karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan (Noor *et al*, 2010).

### **2.6.3 Profitabilitas (ROA)**

Berdasarkan pengukuran *effective tax rate* (ETR) yang dipengaruhi oleh kemampuan menghasilkan laba perusahaan maka tarif pajak efektif berbanding lurus dengan kemampuan menghasilkan laba perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Xing dan Shujung (2007) menunjukkan hubungan yang positif antara kemampuan menghasilkan laba perusahaan dengan tarif pajak efektif. Berdasarkan konsep kemampuan menghasilkan laba perusahaan akan menunjukkan semakin meningkatnya laba perusahaan dapat secara langsung mempengaruhi tarif efektif perusahaan.

### **2.6.4 Capital Intensity Ratio**

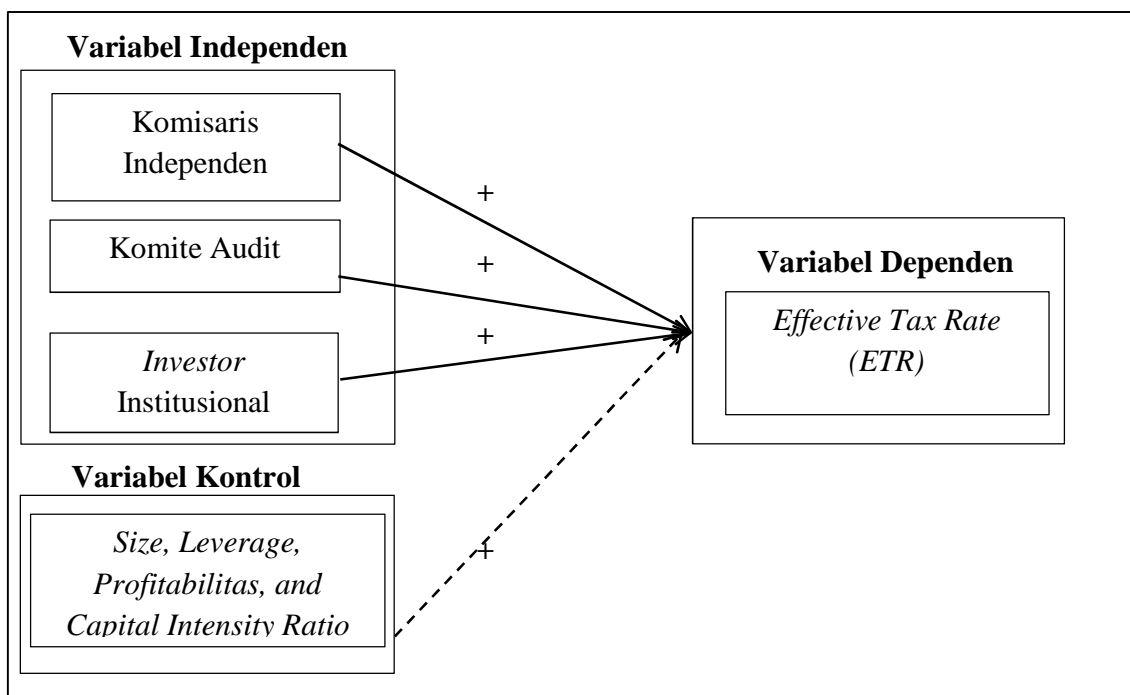
Aktivitas investasi perusahaan umumnya dikaitkan dengan seberapa besar perusahaan menanamkan modalnya pada aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Intensitas modal diukur dengan melihat seberapa besar aset tetap yang digunakan oleh perusahaan dibandingkan dengan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Hampir seluruh aset tetap mengalami penyusutan yang penghitungannya dapat dilakukan dengan beberapa metode penyusutan. *Tax shield* yang terjadi pada investasi modal karena adanya aturan yang menjelaskan diperkenalkannya penyusutan aset yang lebih cepat dari umur ekonomisnya (Gupta dan Newberry, 1997).

Biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

## 2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis akan menjelaskan bagaimana komisaris independen, komite audit serta *investor* institusional dapat mempengaruhi *effective tax rate* (ETR). Kerangka pemikiran teoritis yang kemudian dikembangkan pada gambar 2.1 sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel tersebut di lapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran (Sekaran, 2003). Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen atau variabel bebas (X) dan variabel dependen atau variabel terikat (Y). Ada tiga variabel independen atau bebas (X) dalam penelitian ini yaitu komisaris independen, komite audit dan *investor* institusional. Sedangkan untuk variabel dependen atau variabel terikat (Y) dalam penelitian ini hanya ada satu yaitu *effective tax rate* (ETR). Berikut akan dijelaskan masing-masing variabel pada bagian selanjutnya.

##### **3.1.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah *Effective tax rate* (ETR). *Effective tax rate* (ETR) adalah tingkat pajak efektif perusahaan. ETR dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. Semakin baik nilai *effective tax rate* ditandai dengan semakin rendahnya nilai *effective tax rate* perusahaan tersebut. Beban pajak yang digunakan hanya menggunakan beban pajak kini dikarenakan pada beban pajak kini dimungkinkan

untuk melakukan pemilihan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perpajakan dan akuntansi.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Keterangan :

ETR = Tingkat Pajak Efektif

Beban Pajak Penghasilan = (beban pajak kini)

### 3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel independen adalah karakteristik *corporate governance* yang terdiri dari: komisaris independen, komite audit dan investor institusional.

#### 1. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Surya dan Yustiavandana, 2006). Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 setiap perusahaan yang telah memiliki komisaris independen sekurang kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris berarti telah memenuhi pedoman *corporate governance*. Variabel ini diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

## 2. Komite Audit

Komite audit merupakan jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Komite audit sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM dan Kementerian BUMN mewajibkan komite audit minimal terdiri dari seorang ketua yang juga komisaris independen dan dua anggota eksternal yang independen. Komite audit diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan.

## 3. *Investor* Institusional

*Investor* institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management* dan kepemilikan institusi lain) Djakman dan Machmud (2008). Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu pemegang saham institusi maka kepemilikan saham diukur dengan menghitung total seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh pemilikan institusi. Rasio ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Proporsi } \textit{Investor} \textit{ Institusional} = \frac{\sum \text{Saham Institusi}}{\sum \text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

### 3.1.3 Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan empat variabel kontrol, yaitu *size* (Ln total asset), *leverage* (LEV), *return on asset* (ROA) dan *capital intensity* (CIR) yang telah

digunakan oleh peneliti terdahulu. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Oleh karena itu, dengan mengontrol keempat variabel ini akan meningkatkan hubungan antara karakteristik *corporate governance* dengan *effective tax rate* (ETR) perusahaan.

#### 1. *Size* (Ukuran Perusahaan)

Ukuran perusahaan merupakan ukuran mengenai besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat ditentukan dari jumlah karyawan, total aktiva, total penjualan, atau peringkat indeks (Hakston dan Milne, 1996). Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan adalah total aktiva karena ukuran perusahaan diproksi dengan *Ln total asset*. Penggunaan *natural log* (Ln) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya.

$$\text{SIZE} = \text{Ln} (\text{Total Asset})$$

#### 2. *Leverage*

*Leverage* menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang dalam membiayai kegiatan operasinya. Selain itu, *leverage* juga memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan sehingga dapat melihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* adalah *debt to equity ratio* (DER) yang diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}} \times 100\%$$

### 3. Return on Asset (ROA)

ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak. ROA juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam hal pengembalian aset yang dimiliki berdasarkan kemampuan menghasilkan laba perusahaan. Hal itu dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba/rugi bersih tahun berjalan}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

### 4. Capital Intensity Ratio

Rasio intensitas modal menjelaskan seberapa besar investasi perusahaan yang ditanamkan pada aset. Variabel ini diukur dengan menggunakan rasio antara aset tetap bersih (setelah akumulasi penyusutan) terhadap total aset.

$$\text{CIR} = \frac{\text{Total aset tetap bersih}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

## 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan pemerintah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2009 hingga 2011. Digunakannya sampel perusahaan pemerintah (BUMN) yang terdaftar di BEI dikarenakan pada perusahaan pemerintah tersebut dimungkinkan adanya konflik yang terjadi antara

pemegang saham utama (pemerintah) dengan manajemen perusahaan dalam penentuan kebijakan mengenai tarif pajak efektif perusahaan dan pada tahun 2009 merupakan tahun pajak pertama setelah adanya reformasi perpajakan pada tahun 2008.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *non random sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Salah satu teknik pengambilan sampling yang termasuk dalam teknik *non random sampling* adalah metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti, dimana terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh sampel (Sugiyono, 2004).

Kriteria yang diterapkan terhadap pengambilan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan pemerintah tersebut tidak *delisting* selama periode pengamatan.
2. Perusahaan pemerintah tersebut sebagian sahamnya dimiliki oleh manajemen dan institusi selama periode pengamatan.
3. Perusahaan pemerintah tersebut memiliki dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit selama periode pengamatan.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang merupakan kombinasi antara data runtut waktu (*time series data*) dan silang

tempat (*cross section data*) dimana data tersebut merupakan data kuantitatif dalam bentuk publikasi. Sumber data yang digunakan berasal dari *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD), *annual report*, dan mengakses website Bursa Efek Indonesia melalui internet ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

### **3.4 Metode Analisis**

#### **3.4.1 Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), *median*, *modus*, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2006). Statistik deskriptif dapat menjelaskan variabel – variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program SPSS 16.

#### **3.4.2 Uji Asumsi Klasik**

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model pada penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung *multikolonieritas* dan *heteroskedastisitas*. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu lebih dahulu pengujian asumsi klasik yang terdiri dari:

## 1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak (Gujarati, 2003). Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, *ploting* dan *residual* yang akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2006)

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data *residual* terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006).

## 2. Uji multikolonieritas

Uji multikolonieritas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi variabel bebas (independen) atau tidak. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Jika terdapat korelasi antara variabel independennya maka variabel-variabel tersebut tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2006).

Gejala multikolineritas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* digunakan untuk mengukur variabilitas independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolineritas adalah nilai *tolerance* <0,10 atau sama dengan  $VIF > 10$  (Ghozali, 2006).

### 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem autokorelasi*. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena *residual* (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2006).

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan Uji *Durbin-Watson (DW test)*. Uji *Durbin Watson* digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* diantara variabel independen (Ghozali, 2006).

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tdk ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tdk ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tdk ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tdk ada autokorelasi negatif	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tdk ada autokorelasi, positif atau negatif	Tdk ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Imam Ghozali, 2006

### 4. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang

lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residual (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Selain itu pendeteksian ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *glejser* yaitu meregresikan absolut nilai residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen, jika probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan 5% maka tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

### 3.4.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi hubungan antara karakteristik *corporate governance* dan *effective tax rate* (ETR). Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ETR_t = \alpha_0 + \beta_1 IND_t + \beta_2 CA_t + \beta_3 IS_t + \beta_4 SIZE_t + \beta_5 LEV_t + \beta_6 ROA_t + \beta_7 CIR_t + \epsilon$$

Keterangan:

ETR	: Tingkat Pajak Efektif
$\alpha_0$	: Konstanta
IND	: Komisris Independen
CA	: Komite Audit
IS	: <i>Investor</i> Institusional
SIZE	: Ukuran Perusahaan dihitung dengan Ln Total Aset
LEV	: Rasio Leverage ( <i>Debt to Equity Ratio</i> ) dihitung dengan total hutang dibagi total aset
ROA	: <i>Return on Asset</i> dihitung dengan laba bersih dibagi total aset
CIR	: Total aset tetap bersih dibagi dengan total aset
€	: <i>Error</i>

#### 3.4.4 Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*nya. Secara statistik, setidaknya *goodness of fit* dapat diukur dari nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ), nilai uji statistik F dan nilai uji statistik t.

##### 3.4.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan antara nilai F-tabel dengan F-hitung hasil *run* regresi yang dilakukan. Jika nilai F-tabel < F-hitung maka dapat disimpulkan model dapat diterima dan layak digunakan untuk

menjelaskan ETR. Pengaruh yang signifikan dari variabel independen sebagai faktor yang mempengaruhi nilai ETR harus memiliki nilai signifikansi sebesar  $<0,05$  sehingga dapat dilanjutkan dengan pengujian statistik t (Ghozali, 2006).

#### **3.4.4.2 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan uji model. Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang lebih kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted  $R^2$*  pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Dalam kenyataan nilai *adjusted  $R^2$*  dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif (Ghozali, 2006). Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2006) jika dalam uji empiris didapat nilai *adjusted  $R^2$*  negatif, maka nilai *adjusted  $R^2$*  dianggap bernilai nol.

#### **3.4.4.3 Uji t (parsial)**

Uji hipotesis dilakukan dengan uji t. Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2006). Apabila t hitung yang diperoleh

lebih besar dari t tabel berarti t hitung signifikan yang berarti hipotesis diterima. Sebaliknya apabila t hitung yang diperoleh lebih kecil dari t tabel maka berarti hipotesis ditolak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Penerimaan dan penolakan hipotesis dapat dilihat dari masing-masing variabel. Apabila nilai  $t > 0,05$  maka hipotesis ditolak dan sebaliknya jika  $t < 0,05$  maka hipotesis diterima (Ghozali, 2006).